

**LAPORAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah langkah penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sistem penyelenggaraan yang lebih baik efektif dan efisien. Baik artinya mampu menyelesaikan permasalahan tanpa memberikan permasalahan lainnya. Efektif artinya menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar dan tepat. Sedangkan efisien artinya menyelesaikan permasalahan dengan sumber daya yang minimal. Adapun tujuan dari penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan adalah kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang **Grand Design** Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu membangun **pilot project** pelaksanaan reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### 1.2 Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

### 1.3 Tujuan

1. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui perubahan secara sistematis dan konsisten kerja, pola pikir atau mind set, serta budaya kerja atau *culture set* individu pada lembaga yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik.

#### **1.4 Hasil yang Diharapkan**

Untuk lebih mempercepat tercapainya program Reformasi Birokrasi itu secara efektif dan terarah, maka perlu secara konkret diprogramkan suatu strategi pencapaian target reformasi birokrasi tersebut melalui implementasi program pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK), yang meliputi:

- a) Penerapan program manajemen perubahan;
- b) Penataan tata laksana;
- c) Penataan manajemen SDM;
- d) Penguatan pengawasan;
- e) Penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- f) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **2.1 Penyelenggaraan Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara baik melalui media cetak, media sosial, pembinaan secara langsung dengan cara sistem apel pagi dan sore, acara keagamaan dan lain-lain yang rutin dilakukan oleh pimpinan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **2.3 Peserta**

Peserta sosialisasi kegiatan ZI WBK Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah seluruh pegawai Kantor Provinsi Nusa Tenggara barat dan beberapa undangan masyarakat termasuk tenaga pendidik.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal dari penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Oleh karena itu penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan adalah kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dihindarkan. Dengan adanya sosialisasinya ZI WBK ini dapat meningkatkan kinerja dan menjadi panutan bagi instansi lain untuk memiliki kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, dan tidak pernah melakukan tindak pidana serta melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

#### **3.2 Saran**

Sosialisasi ZI WBK ini diharapkan dapat terus dilakukan dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan etos kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.